



Hotel Mulai Rasakan Imbas PSBB

JOGJA—Pelaku pariwisata di DIY sudah merasakan imbas rencana penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di DKI Jakarta, yang diberlakukan mulai Senin (14/9), hari ini.

Herlambang Jati Kusuma,
Abdul Hamid Razak,
& Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

► Tingkat hunian kamar hotel di DIY sebenarnya telah menunjukkan tren yang baik.

► Sejumlah daerah di DIY sudah mulai mengantisipasi pemudik maupun pendatang dari DKI Jakarta setelah PSBB diberlakukan.

Ketua Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) DPD DIY, Herryadi Baiin mengatakan kebijakan PSBB di Jakarta dapat berdampak secara ekonomi pada wilayah-wilayah lainnya.

Herryadi Baiin menjelaskan akhir-akhir ini DIY sebenarnya sudah mulai ramai wisatawan dengan diterapkannya adaptasi kebiasaan baru. Aktivitas masyarakat mulai berjalan dengan protokol pencegahan Covid-19. Tingkat hunian kamar hotel telah menunjukkan tren yang baik, dari Juli ke Agustus cukup lumayan meningkat sekitar 40%, dari sebelumnya tingkat hunian hanya 15%-20% meningkat menjadi 60%.

"Beberapa kegiatan [tamu] juga dari Jakarta, dengan protokol pencegahan Covid-19 pastinya. Adanya PSBB ini akan berdampak pada ekonomi. Info dari beberapa hotel juga sudah ada tamunya yang *cancel*," kata Herryadi, Sabtu (12/9).

Ia mengatakan DPD IHGMA DIY berharap agar kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan saat ini dapat tetap berjalan agar industri pariwisata dapat bangkit kembali. Namun diperlukan kesadaran masyarakat dan juga bagi mereka yang datang ke DIY agar mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yaitu wajib memakai masker.

Hotel Mulai...

Selain itu, siapa pun di dalam melaksanakan aktivitasnya, tidak berkerumun, selalu menjaga jarak satu dengan yang lainnya dan rajin mencuci tangan.

DPD IHGMA DIY juga mendukung program Dinas Pariwisata melalui kabupaten/kota dalam melaksanakan verifikasi penerapan protokol kesehatan Covid-19 hotel di wilayah DIY yang dilaksanakan melalui gugus tugas dan juga PHRI. Langkah ini sangat bermanfaat agar dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi tamu yang menginap ataupun yang melakukan kegiatan di hotel.

"Kami berharap setelah diverifikasi manajemen hotel wajib secara konsisten menerapkan protokol tersebut. Demikian juga dengan kesehatan karyawan hotel wajib mendapat perhatian. Hingga saat ini beberapa hotel sudah diverifikasi di wilayah DIY, begitu juga dengan tempat wisata. Kami bersyukur bahwa Jogja sampai saat ini masih berada di zona kuning. Oleh karena itu bagi tamu yang berkunjung ke Jogja juga kami harapkan dalam kondisi yang sehat serta dapat menunjukkan surat hasil *rapid test* atau PCR [*polymerase chain reaction*], kiranya pandemi Covid-19 segera berlalu dan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa," ucapnya.

Instansi

► Halaman 10

1.
2.
3.
4.
5.

- ☐ Negatif
☐ Positif
☐ Netral

- ☐ Ane
☐ Seg
☐ Bias

ut

japi

lui

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono menambahkan dan meluaskan kabar yang menyebut di DIY tertutup bagi wisatawan atau tamu yang mengadakan rapat.

"DIY masih bisa menerima tamu yang mengadakan rapat atau kunjungan, tetapi harus sesuai protokol kesehatan yang sudah ada. Saat ini dari zona merah perlu adanya hasil *swab* hal ini diperlukan untuk saling menjaga penyebaran virus Covid-19," ucap Deddy.

Deddy mengatakan DIY masih aman dan terkendali, tetapi peran serta masyarakat dan tamu-tamu, wisatawan sangat diperlukan dengan disiplin, jujur dalam melaksanakan protokol kesehatan. Agar dapat saling melindungi.

Antisipasi Pemudik

Sementara itu, sejumlah daerah di DIY sudah mulai mengantisipasi pemudik maupun pendatang dari DKI Jakarta setelah PSBB diberlakukan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis menyatakan semua pemudik dan pendatang yang akan masuk ke wilayah Bantul harus menasaktikan diri dalam kondisi sehat dari Covid-19.

Salah satu syarat sehat itu adanya surat keterangan negatif hasil tes *swab* dari dokter atau intansi rumah sakit.

Namun jika pemudik dan pendatang tidak membawa surat sehat tetap dibolehkan masuk dengan catatan mengisolasi mandiri selama 14 hari dan melaporkan melalui ketua RT setempat serta mendaftarkan diri lewat aplikasi.

"Kalau tidak membawa

surat sehat] nanti *swab*-nya di sini, soalnya kalau tiba-tiba sampai di sini tidak bawa [surat sehat] hal manusiawi juga. Nanti di-*swab* melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Bantul," kata Helmi.

Helmi mengatakan pemudik akan dipantau selama 14 hari sejak kedatangan oleh Gugus Tugas Percepatan Covid-19 tingkat kecamatan bersama puskesmas di masing-masing kecamatan. Bahkan jika pemudik tidak melapor lewat aplikasi, kata dia, tetap akan didata oleh tim dari kecamatan.

Semua pemudik atau pendatang yang memiliki salah satu gejala mengarah pada Covid-19 seperti sakit tenggorokan, batuk, atau demam akan langsung dilakukan pengambilan spesimen untuk cek *swab*.

"Pemudik harus tetap mengisi aplikasi kemudian puskesmas akan lakukan *screening* pada mereka. Kalau mereka diperlukan tes *swab* akan dites di-*swab*," kata Helmi.

Langkah serupa juga dilakukan Pemkot Jogja. Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi menegaskan tidak pernah ada perubahan kebijakan terkait dengan masyarakat yang berasal dari luar Jogja.

Bagi pendatang yang berasal dari wilayah zona merah Covid-19 diharuskan membawa surat bebas Covid-19 baik itu *rapid test* maupun *swab test*.

Jadi, kebijakan bawa surat bebas Covid-19 itu sejak awal pandemi Covid-19 sudah kami lakukan.

Heroe Poerwadi
Wakil Wali Kota Jogja

"Jadi tidak pernah ada perubahan, sejak awal pandemi sampai sekarang tidak ada perubahan. Kebijakan bawa surat bebas Covid-19 itu sejak awal pandemi Covid-19 sudah kami lakukan," ujar Heroe.

Heroe mengakui pemeriksaan terhadap warga Jogja maupun pengunjung yang berasal dari Jakarta maupun wilayah zona merah Covid-19 tidak seketat saat awal-awal pandemi Covid-19.

"Memang mungkin sudah agak kendor dalam hal pemeriksaan, tapi orang dari luar kota kan sudah otomatis sadar untuk membawa surat bebas Covid-19 entah itu *rapid test* maupun *swab test*," kata Heroe.

Upaya pendataan pemudik maupun pendatang yang datang ke wilayah kota Jogja masih dan terus dilakukan, mulai dari kecamatan hingga RW.

"Sudah semua RT RW dan lurah membuat laporan mulai dari pendatangnya berapa dan pemudiknya berapa, itu ada semua. Sejak dulu tidak pernah berhenti, mulai sejak Maret hingga sekarang terus kami monitor," terang Heroe.

Disinggung mengenai lonjakan pemudik maupun pendatang

yang datang ke wilayah Jogja seiring dengan diberlakukannya PSBB pada Senin (14/9), Heroe menyebutkan belum ada lonjakan yang signifikan.

"Kalau saya lihat masih stabil," ujarnya.

Kajian Kondisi

Dinas Kesehatan (Dinkes) Sleman sedang melakukan kajian kondisi penyebaran Covid-19 menyusul rencana penerapan PSBB di Jakarta.

Hasil kajian tersebut akan menjadi landasan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemkab Sleman.

"Jadi sampai saat ini belum ada kebijakan baru terkait dengan rencana pemberlakuan PSBB di Jakarta. Kami sedang lakukan kajian dulu mengenai kondisi Sleman saat ini," kata Kepala Dinkes Sleman, Joko Hastaryo.

Pada masa awal PSBB lalu, Pemkab Sleman mengeluarkan sejumlah aturan di mana warga pendatang, pemudik hingga calon mahasiswa yang masuk ke wilayah Sleman harus melakukan tes cepat Covid-19 atau membawa surat keterangan bebas Covid-19.

Apakah ada kebijakan baru dari Pemkab atau tidak nanti diputuskan setelah Dinkes menyerahkan hasil kajian yang dilakukan.

Di wilayah Sleman kasus baru Covid-19 terus mengalami peningkatan seiring dengan masifnya uji *swab* yang dilakukan oleh Dinkes.

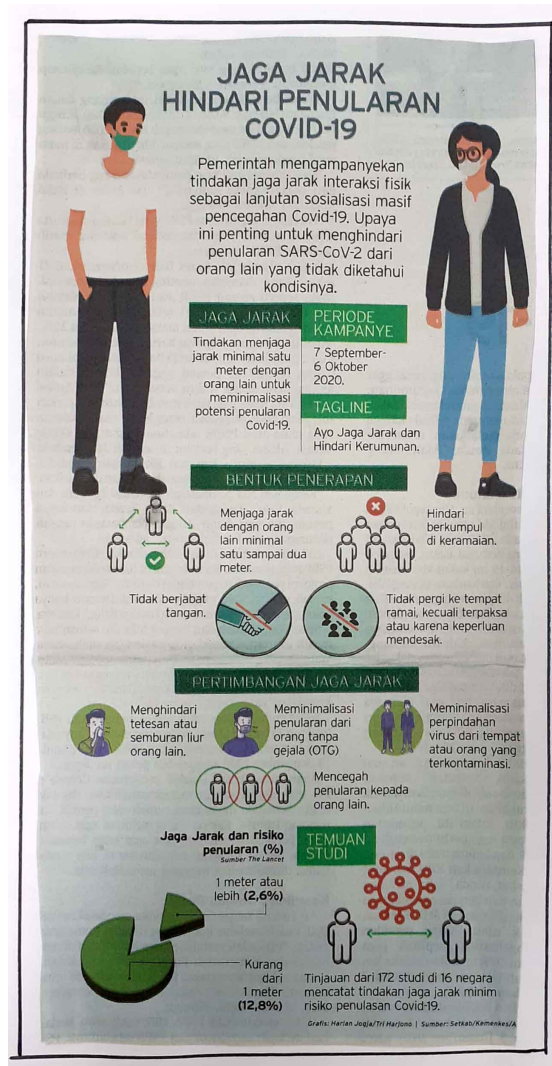
Beragam peraturan yang dikeluarkan oleh Pemkab tersebut, katanya, bertujuan untuk menekan kasus baru agar penyebaran Covid-19 di wilayah Sleman tidak mengalami peningkatan. Pemkab sudah mengeluarkan Perbup No.37.1/2020 terkait Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19," katanya.

Disinggung soal antisipasi PSBB di Jakarta, Evie mengatakan hal itu masih menunggu keputusan dari Pemda DIY. Hanya saja, kata Evie, warga Sleman di luar daerah yang kembali ke Sleman tetap diwajibkan melaporkan kedatangannya ke Gugus Tugas Covid-19 tingkat dusun. "Untuk pembatasan wilayah, Pemkab Sleman mengikuti DIY, karena semua koordinasi terpadu," katanya. (Hafiz Yudi Suprabadi)

"Hasil kajian akan kami sampaikan rencananya pada Selasa lusa. Segala bentuk kebijakannya nantinya akan disampaikan," katanya.

Hal senada disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Covid-19 Sleman Shavitri Nurmaldewi. Menurutnya, terjadinya lonjakan kasus baru Covid-19 di Sleman akan memaksa Pemkab untuk lebih memperketat aturan yang sudah dikeluarkan.

Tinggal bagaimana penegakan aturan tersebut di lapangan. "Semua aturan diperketat pelaksanaannya. Karena di Sleman sebetulnya dari sisi aturan sudah ada semua, sejak dari kegiatan di masyarakat, ASN, dunia usaha, dan lainnya," kata Evie.



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005